**PERANAN BAITUL MAL AL-HIDAYAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN MODAL SOSIAL**

**(STUDI KASUS PADA PEDAGANG USAHA MIKRO DI KELURAHAN JODIPAN KOTA MALANG)**

Ria Angela1, Darsono Wisadirana2, Edi Susilo3

1 Lulusan Program Pascasarjana, FISIP, UB

2 Dosen Program Pascasarjana, FISIP, UB

3 Dosen Program pascasarjana, FPIK, UB.

**Abstrak**

Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi hampir semua negara terutama di negara-negara berkembang. Dari kenyataan banyaknya program pemerintah dan fakta kemiskinan menunjukkan program tersebut belum berhasil efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya, dan ketidakjelasan kriteria sasaran. Ajaran islam memberikan peluang besar bagi umatnya dalam mengantisipasi persoalan kemiskinan. Ajaran islam yang relevan dengan hal tersebut adalah ajaran (ZIS). ZIS jika dikelola secara terorganisir dengan memanfaatkan modal sosial yang terdapat di masyarakat akan memberikan dampak sosial-ekonomi positif bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai alat analisanya, sedangkan jenis penelitiannya berjenis deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : Peranan yang telah dilaksanakan Baitul Mal yakni (1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah berupa menerapkan sistem ekonomi islami yakni memberikan modal tanpa bunga.(2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil (3)Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Ketiga peranan Baitul Mal timbul berkat adanya kepercayaan, partisipasi dalam jaringan norma, nilai dan hubungan timbal balik antara Baznas selaku pembina kepada Baitul Mal selaku Amil, dan Baitul Mal kepada Mustahiq (anggota) yang dibangun dengan prinsip kesukarelaan, kesamaan dan solidaritas untuk menanggulangi masalah yang ada di lingkungan mereka. Strategi Pemberdayaan pada pedagang usaha mikro binaan Baitul Mal dimulai dari menyelesaikan kebergantungan terhadap rentenir. Kemudian dilakukan pemberdaan secara kelompok dengan mengumpulkan usaha mereka sesuai dengan konsep hulu ke hilir dengan prinsip solidaritas diantara mereka. kemudian dilakukan kegiatan pelatihan, memberikan sertifikasi menejemen mutu halal dari MUI dan mengikutsertakan usaha binaan Baitul Mal dalam pameran hasil UMKM serta melakukan rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh dewan pengawas syariah guna menjamin kepastian dan keberlangsungan usaha mereka.

Kata kunci : Modal Sosial, Pemberdayaan, Zakat.

**ROLE OF BAITUL MAL AL- HIDAYAH IN ALLEVIATION POVERTY BASED ON SOCIAL CAPITAL (STUDY ON MICRO MERCHANT IN JODIPAN MALANG).**

**Abstract**

Poverty is the development challenges in virtually all countries, especially in developing countries. Of the fact that many government programs and the fact of poverty shows the program has not been managed effectively as expected. Indonesia. This is due to irregularities in its implementation, and the vagueness of the target criteria. The teachings of Islam provides a great opportunity for his people to anticipate the problem of poverty. Islamic teachings are relevant to the matter is the doctrine (ZIS). ZIS if managed in an organized manner by utilizing social capital contained in the community will provide positive socio-economic impact for the community. This research applied a social capital theory and society empowerment as the analysis tools, and used a qualitative descriptive method along with the case study method. In conclusion, implemented Baitul Mal namely (1) Keep the community of non-Islamic economic practices such as applying Islamic economic system of providing capital without interest. (2) Conducting development and financing small businesses (3) Removing the dependence on moneylenders. The third role of Baitul Mal arise due to lack of trust, participation in the network of norms, values and interrelationships between Baznas as adviser to the Baitul Mal as Amil, and Baitul Mal to Mustahiq (members) are built on the principle of voluntarism, equality and solidarity to tackle the exist in their environment. Empowerment strategy on micro-business merchants built Baitul Mal starts from completing dependence on moneylenders. Pemberdaan then carried out in groups to gather their businesses in accordance with the concept of upstream to downstream with the principle of solidarity among them. then carried out training activities, providing quality management halal certification from MUI and built businesses include Baitul Mal in the exhibition of their product as well as the evaluation meeting conducted periodically by sharia supervisory board in order to ensure predictability and sustainability of their businesses.

**Keywords:** Empowerment, Social Capital, Zakat.

Alamat Korespondensi Penulis:

Ria Angela Wardoyo, S.STP, M.Sos.

Email : [riaangelawardoyo@yahoo.co.id](mailto:riaangelawardoyo@yahoo.co.id)

Alamat : Sawojajar Kota Malang

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah dalam Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu hal besar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Berbagai program pengetasan kemiskinan dari dulu hingga sekarang terus menerus dilakukan. Demikian pula dengan dana yang digelontorkan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian pada APBN 2011 mencapai sekitar Rp.95 triliun (sahri 2006). Terlebih lagi pada kondisi perekonomian yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998 yang kemiskinan mengalami peningkatan pada waktu tersebut dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,2 juta jiwa.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan karena terbukti pemberdayaan di sektor ini yang mampu bertahan pada krisis moneter tahun 1998. Peran Usaha mikro dalam menyerap 5.408.857 tenaga kerja secara nasional pada tahun 2013 dan meningkat terus sebesar 6.039.855 pada tahun 2014. Seimbang dengan kuantitasnya yang begitu besar, tenaga kerja yang diserap di sektor ini di Provinsi Jawa Timur pun begitu besar. Pada tahun 2013 sebanyak 1.072.286 tenaga kerja yang mampu diserap dan meningkat terus 1.195.368 tenaga kerja pada tahun 2014 (BPS 2013). Di tengah sempitnya lapangan pekerjaan dan minimalnya kualitas SDM yang dimilki masyarakat kita, usaha di sektor non formal seakan menjadi solusi bagi mereka untuk menyambung hidup dan memperoleh penghasilan walaupun pendapatan yang mereka dapat tak tentu hasilnya**.**

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dan mikro di negara ini masih mendapat hambatan ketika berusaha mengakses modal, padahal minimnya modal termasuk kendala utama bagi pelaku UKM untuk berkembang. Masyarakat miskin di kelurahan Jodipan ini kian terhimpit keadaannya karena dalam kondisi kekurangan modalnya untuk usaha, kekuatan tenaga mereka dan usaha yang kuat sehingga tidak mengenal lelah dan mengenal waktu, dimanfaatkan oleh sebagian masyarakatnya yang kelas ekonominya sedikit diatas level mereka yakni rentenir(Zenrif,2015). Aatas dasar aspirasi warga di Kelurahan Jodipan, maka Baznas membentuk Baitul Maal di wilayah tersebut dan menyalurkan dana zakat produktif pada lembaga tersebut dengan harapan masyarakat miskin agar dapat mengembalikan kondisi ekonominya dan melepaskan mereka dari himpitan ekonomi yang melanda mereka.

Baitul mal sebagai bentuk dari pranata sosial, telah menjadi salah satu alternatif bagi UKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam sejarah Islam, baitul maal merupakan institusi keuangan yang bertanggungjawab mentadbir cukai. Baitul maal berfungsi sebagai perbendaharaan khalifah dan sultan yang mengurus kewenangan pribadi dan perbelanjaan kerajaan. Ia juga mengurus pengagihan zakat untuk rakyat awam. Pakar ekonomi Islam moden menganggap rangka institusi baitul maal merupakan cara yang sesuai untuk masyarakat Islam sekarang (Sahri,2006).

Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran mengenai modal sosial (yakni kepercayaan,partisipasi, norma, nilai dan hubungan timbal balik) sebagai identitas perilaku anggota menjadi pondasi dalam solusi penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka sehingga anggota KMKP Baitul Maal Al-Hidayah ini akan kembali dalam sistem yang berkedok rentenir tersebut. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat berdasarkan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui peranan Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan berlandaskan modal sosial di Jodipan Kota Malang.
2. Mengembangkan strategi pemberdayaan oleh Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan modal sosial di Kelurahan Jodipan Kota Malang.

**Studi Literatur**

1. **Teori Modal Sosial**

**Kepercayaan**

Robert Putnam (1993) dalam field (2014) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Kepercayaan ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: (a) seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberanian berpendapat dengan pemimpinnya (b) seberapa banyakkah warganegara yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya. Selanjutnya putnam mendefinisikan kepercayaan sebagai bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan “yakin” bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan saling mendukung. Bahkan putnam menegaskan bahwakepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik.

Berbagai tindakan kolektif yang didasari rasa saling percaya yang tinggi sebagaimana diungkapkan oleh Putnam (1993) dalam field (2014) akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun bersama. Sebaliknya kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengudang berbagai problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling percaya akan sulit menghindari berbagai kesetiakawanan sosial dan ekonomi yang mengancam, sehingga lambatlaun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan.

**Partisipasi dalam Jaringan**

Putnam (1995) dalam Field (2014) kembali menyatakan bahwa jejaring sosial ini berupa jejaring organisasi ataupun jejaring individu yang berbentuk pertalian dan penghubung, mendukung gerak aksi kolektif menjadi makin sinergis. Infrastruktur-infrastruktur dinamis dari modal sosial dapat berwujud jejaring kerja sama antar manusia. Jejaring kerjasama ini memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi dan kemungkinan tumbuhnya kepercayaan dan kerjasama. Putnam juga berargumentasi bahwa jejaring sosial yang kuat akan memperkuat peraaan kerjasama serta partisipasi para anggota.

Kemampuan anggota masyarakat untuk menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat mempengaruhi lemah atau kuatnya modal sosial dalam suatu masyarakat. Kemampuan tersebut terwujud dalam bentuk partisipasi dalam membangun jejaring sosial dalam sebuah hubungan yang saling berdampingan. Partisipasi anggota masyarakat harus berlandaskan prinsipsukarela, kesamaan, kebebasan dan keadaban.

Partisipasi dan jejaring sosial yang terbentuk akan memiliki tipologi khas sesuai dengan karakteristik dan orientasi kelompok tersebut pada kelompok masyarakat tradisional partisipasi dan jejaring sosial akan terbentuk didasarkan pada garis keturunan, pengalaman-pengalaman sosial turun temurun, dan kesamaan kepercayaan pada dimensi religius. Sebaliknya pada kelompok masyarakat modern yang memiliki kesamaan orientasi dan tujuan melalui pengelolaan organisasi, tingkat partisipasi anggotanya lebih baik serta mimiliki rentan jaringan yang luas.

**Norma-Norma Sosial**

Norma-norma sosial berperan penting dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang timbul dala masyarakat. Menurut Jeffries (1980) dalam Leksono (2009) bahwa norma itu mengandung tentang ide dan kewajiban dan keharusan. Sebagaimana yang diungkapkan Fukuyama (1999) dalam Leksono (2009) bahwa modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka.

Hasbullah (2006), norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sangsi-sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat dari sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan berprilaku di masyarakatnya. Aturan-aturan tidak kolektif ini biasanya tidak tertulis tetapi dipahami setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

**Nilai-Nilai Sosial**

Nilai-nilai manusialah yang bisa berfungsi untuk mengkoordinasikan manusia, dan ketika untuk mencapai tujuan akhir itu tidak terkait dengan nilai manusia bersama, bahkan cenderung melemahkan masyarakat bebas. Nilai merupakan tujuan akhir yang umumnya ingin dicapai manusia. Nilai-nilai ini memberikan motivasi kuat bagi tindakan manusia dan memiliki pengaruh menyeluruh terhadap tindakan manusia sehari-hari (Wolfgang kasper and Manfred E. Streit, 1988 dalam Leksono, 2009).

Menurut Marzali (2005) dalam Leksono (2009) sebagai konsepsi, nilai bersifat abstrak, berada dalam bangunan fikiran ataupun akal budi, namun nilai dapat disimpulkan dan ditafsirkan pada ucapan, perbuatan dan materi yang dihasilkan. Jadi sesuatu ucapan, sesuatu tindakan dan sesuatu materi yang dihasilkan oleh seorang subyek adalah manifestasi dari nilai.

**Hubungan Timbal Balik**

Hubungan timbal balik (Reciprocity)adalah pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok. Polanyi (1968) dalam Leksono (2009) telah meletakkan landasan tentang pengertian resiprositas dengan menunjukkan karekteristik dari pelaku pertukaran Rasa timbal balik sangat besar yang difasilitasi oleh bentuk simetri institusional dengan ciri utama organisasi orang-orang yang tidak terpelajar. Bertolak dari batasan itu, maka resiprositas tidak dapat berlangsung sebelum terpenuhinya hubungan simetris,yakni hubungan sosial yang masing-masing pelaku menempatkan diri pada kedudukan dan peranan sama ketika proses pertukaran berlangsung.

**Konsep Pemberdayaan**

Secara konspetual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empeworment) berasal dari kata “power” ( kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, (c). Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka ( Suharto, 1997).

Adapun pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5-P (Suharto,2005), antara lain :

1. Pemungkinan, menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki sasaran pemberdayaan sehingga dapat berkembang secara optimal,
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan dalam rangka memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan, melindungi sasaran pemberdayaan, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu untuk menjalankan peranan dan tugasnya.
5. Pemeliharaan, pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah di Baitul Mal Al-Hidayah Kota Malang sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat produktif dari Baznas Kota Malang di Kelurahan Jodipan Kota Malang. Baitul Mal Al-Hidayah Kelurahan Jodipan dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian karena Baitul mal di daerah tersebut merupakan bentuk dari pranata sosial dan mampu melepaskan ketergantungan warga dari jeratan rentenir.

**Metode Pengumpulan Data**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini secara Purposive (informan dari BAZNAS Kota Malang, Baitul Mal Al-Hidayah dan UKM binaan Baitul Mal di Kelurahan Jodipan dan pegawai Kelurahan Jodipan). Sedangkan untuk pengumpulan datanya yang pertama dengan mengadakan wawancara mendalam *(indepth interview)* untuk memperoleh data primer dari informan. Yang kedua dengan mengadakan observasi atau pengamatan untuk melengkapi dan cross-check terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Dan yang ketiga dengan melakukan dokumentasi atau pengumpulan data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen seperti monografi Kelurahan Jodipan, jumlah keluarga miskin di lokasi penelitian sebagai pendukung argumen dalam penentuan lokasi penelitian, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Malang tahun 2015 serta beberapa data pendukung lainnya dari internet seperti kondisi kemiskinan di Indonesia secara umum, data kemiskinan menurut BPS, Annual Report BAZNAS Kota Malang, dan lain sebagainya.

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa datanya juga menganut cara yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Teknik analisis data interektif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan bersamaan yaitu : (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Menarik kesimpulan / Verifikasi. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data (Soenyono, 2007).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Peranan Baitul Mal dalam penanggulangan Kemiskinan**

Kelurahan Jodipan adalah satu dari 57 kelurahan yang termasuk padat penduduk kota Malang, tepatnya masuk wilayah Kecamatan Blimbing. Sasaran penangggulangan kemiskinan di Kelurahan Jodipan dilaksanakan dengan menggunakan data BPS Kota Malang dimana tahun 2015 jumlah penduduk di Kelurahan Jodipan sebanyak 13.262 jiwa didalamnya terdapat 3.447 anggota rumah tangga miskin atau sebanyak 766 KK miskin. Prosentase kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Jodipan adalah sebanyak 25,99% dari jumlah penduduk di Kelurahan Jodipan. Jumlah kepala rumah tangga laki-laki sebanyak 615 KK lebih besar dari pada kepala rumah tangga perempuan sebanyak 151 KK di wilayah ini (Bapeko,2015)

Sedangkan untuk distribusi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan para Kepala Rumah Tangga Miskin yang ada di kelurahan Jodipan didominasi pada kelompok tidak tamat SD dengan jumlah sebanyak 387 jiwa atau 50,22% dari jumlah kepala rumah tangga miskin, kemudian disusul oleh kelompok pendidikan SMP dengan jumlah sebanyak 190 jiwa atau 24,80%. kondisi kepala rumah tangga di Kelurahan Jodipan juga banyak yang tidak mempunyai ijasah, yakni sebesar 113 atau 14,7%. Hanya sedikit saja kepala rumah tangga miskin yang mampu menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun atau lebih lebih yakni sebanyak 76 jiwa(PPLS 2011).

Sedangkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian kepala rumah tangga yang ada di Kelurahan Jodipan mayoritas didominasi penduduk pada kelompok mata pencaharian pedagang.

Tabel 1. Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Mata Pencaharian

Di Kelurahan Jodipan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang Pekerjaan** | **Jumlah** | **%** |
| 1. | Pertanian | 7 | 0,914 |
| 2. | Industri Pengolahan | 27 | 3,525 |
| 3. | Bangunan/Konstruksi | 48 | 6,266 |
| 4. | Perdagangan | 218 | 28,46 |
| 5. | Hotel dan Rumah makan | 36 | 4,7 |
| 6. | Transportasi dan Perdagangan | 83 | 10,84 |
| 7. | Jasa pendidikan/jasa kesehatan/jasa kemasyarakatan, pemerintahan | 194 | 25,33 |
| 8. | Lainnya | 153 | 19,97 |
|  | Total | 766 | 100 |

Sumber : PPLS 2011 Kota Malang

Dari tabel diatas dapat dilihat distribusi penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian kepala rumah tangga yang ada di Kelurahan Jodipan mayoritas didominasi penduduk pada kelompok mata pencaharian pedagang serta Jasa pendidikan/jasa kesehatan/jasa kemasyarakatan, pemerintahan dengan jumlah tenaga kerja berturut-turut sebanyak 218 pekerja dan 194 pekerja. Selain itu banyak juga kepala rumah tangga Kelurahan Jodipan yang tidak memiliki pekerjaan. Kebanyakan dari mereka bekerja serabutan ataupun buruh panggilan. Sementara komposisi penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian terkecil dari kepala rumah tangga miskin pada kelompok pertanian.

Program dari Baitul mal ini menyalurkan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi. Besarnya modal usaha yang mereka pinjam beragam dari 500 ribu hingga 5 juta. Pada tahap awal pendistribusian dana zakat produktif di Jodipan ini adalah untuk menolong warga untuk terlepas dari hutang rentenir yang sudah bertahun-tahun. Dana zakat yang telah diberikan kepada masyarakat Jodipan untuk melepaskan mereka dari jeratan rentenir sebanyak 75.000.000 atau sebanyak 60 warga. Selanjutnya pada tahap selanjutnya diwajibkan penyaluran dana zakat bagi mereka yang memiliki usaha (Baznas, 2014).

Tabel2. Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Al Hidayah Jodipan

Sumber: Annual Report Baznas 2014

Pengajuan kredit modal usaha ini diberikan kepada warga Jodipan yang tergolong mustahiq serta berkemauan untuk memerangi kemiskinan pada diri mereka. Kredit modal usaha ini mereka gunakan untuk wirausaha berdagang di pasar kebalen atau berdagang di depan rumah. Pada umumnya mereka adalah pedagang bakso, gorengan, pangsit yang pada dasarnya adalah usaha mikro sebagai PKL.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahap penyaluran** | **Jumlah Rentenir** | **Modal (Rp)** |
| I | 60 | 75.000.000 |
| II | 77 | 110.000.000 |
| III | 66 | 100.000.000 |
| IV | 51 | 102.000.000 |
| V | 61 | 113.000.000 |
| Total | 315 | 500.000.000 |

Kredit modal usaha ini pengembaliannya dilakukan secara mengangsur tanpa bunga. Angsuran bisa dilakukan setiap hari ketika mereka berjualan, adapula yang mingguan. Besarannya angsuran berkisar Rp 3000,00 sampai Rp.15.000.00 per hari. Para anggota berkewajiban menyalurkan infaknya yang ditentukan masing-masing anggota sebesar Rp. 10.000,00 per bulan. Infak ini digunakan untuk menyantuni janda-janda lansia yang berada disekitar lingkungan mereka dan dilaksanakan se pada setiap menjelang lebaran. Selain itu anggota juga diperkenankan menabung di baitul Mal tanpa bunga dan potongan. Besar tabungan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, tidak dipaksakan. Para anggota bisa melakukan pinjaman lagi setalah pinjamannya lunas. Lama pemberian kredit ini bervariasi, namun batas maksimal adalah 4 bulan. Sebagian peminjam yang aktif telah beberapa kali mendapatkan pinjaman, tetapi ada sebagian lagi yang tidak disiplin dalam mengasur pinjamannya. Namun secara keseluruhan anggota yang meminjam di Baitul Mal adalah warga Jodipan sehingga mempermudah pengawasan mereka apabila terjadi penyelewengan. Dari 315 anggota, ada 4 saja yang diberhentikan untuk meminjam kembali di Baitul Mal. Hal ini dikarenakan mereka menyalahgunakan kepercayaan yang merupakan norma yang wajib ditaati bagi setiap anggota baitul Mal, yakni anggota tidak boleh kembali melakukan peminjaman di rentenir kembali. Jika norma ini dilanggar, maka akan dicoret dari keanggotaan.

Pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Baznas. Pelatihan ini berupa pelatihan membuat bakery dan ice cream serta pelatihan membuat bakso. Pelatihan ini dirasa cukup bermanfaat bagi mereka karena memberikan pengetahuan bagaimana membuat bakso yang sehat, dan halal. Karena banyaknya jenis usaha yang terdapat di Baitul Mal membuat kegiatan pelatihan diselenggarakan kepada jenis usaha yang mayoritas dilakukan mereka. Selain itu untuk memperluas jaringan usaha mereka, maka setiap baitul mal bersatu mengembangkan UKM yang ada dimasyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok dengan prinsip kesamaan usaha. Kelompok usaha tersebut dinamakan KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif). KMKP ini diarahkan yang dilakukan pendampingan dan dikelompokkan atas ikatan solidaritas sosial seperti kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan usaha. Usaha yang dirancangkan memiliki usaha yang sama dan mendukung konsep hulu hingga ke hilir mulai dengan rencana produksi hingga pemasaran.

Dari mereka yang mendapatkan pinjaman, sebagian besar mereka bisa meningkatkan penghasilannya. Akantetapi, kenaikkan itu seiring dengan kenaikan kebutuhan keluarga mereka. Umumnya kenaikkan pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak tersisa untuk berinfak dan menabung. Walaupun diantara mereka masih ada yang mampu menabung dan berinfak, tetapi tabungan mereka hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek. Biasanya tabungan diambil untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka, membeli perabotan rumah tangga mereka dan sebagainya

**Modal Sosial pada Baitul Mal Al-Hidayah**

Solusi penanggulangan kemiskinan dalam paradigma zakat menempatkan penguatan kelembagaan Baitul Mal sebagai unsur penting untuk menjadikan pengelolaan zakat dan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara profesional, sekaligus akan membangkitkan modal sosial bagi mayarakat miskin. Penguatan modal sosial merupakan kunci penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin secara merata temuan-temuan unsur-unsur modal sosial dalam pengelolaan Baitul Mal Al Hidayah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Kepercayaan

Adanya sikap saling percaya diantara anggota masyarakat akan mempertinggi keeratan harmoni hubungan antar anggota masyarakat pada suatu komunitas. Dalam menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq pada tahap awal fokus pada pemberantasan rentenir. Kemudian pengajuan pada tahap selanjutnya diwajibkan ada usahanya. Para calon anggota harus melakukan tahap seleksi dengan cara bersedia untuk dibantu menyelesaikan hutangnya kepada rentenir dan berjanji untuk tidak kembali kepada rentenir ataupun kredit yang berkedok koperasi abal-abal. Perjanjian itu secara alami merupakan ikatan saling percaya bahwa dan memiliki perasaan “yakin” bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan (Putnam, 1995). Hal ini ditunjukkan dengan peran serta aktif anggota melakukan pembayaran angsuran ke koordinator sebelum waktu akhir pekan tiba karena pada saat itulah jadwal pembayaran angsuran. Pemahaman yang diberikan Ketua Baitul Mal kepada anggota Baitul mal bahwa dana yang digunakan oleh Baitul Mal untuk membantu masyarakat Jodipan itu berasal dari uang kyai di Baznas. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya setiap bulan dihadapan Kyai dan Ketua Baznas. Hal tersebut membuat terjalinnya kerjasama antara Ketua Baitul Mal dan anggota Baitul Mal untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pak kyai kepada mereka. Sikap yang ditunjukkan bu Hartati dengan Ketua Baitul Mal menandakan terjalinnya kepercayaan, orang-orang yang bekerjasama atas dasar saling kepercayaan akan melakukan kerjasama dengan baik. Karena adanya kesediaan mereka untuk menempatkan kepentingentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Kepercayaan seperti energi yang membuat kelompok, masyarakat dan baitul mal dapat bertahan Dalam kegiatan penyaluran zakat kepada mustahiq, ketua baitul mal memberikan kepercayaan kepada warganya dengan prinsip saling percaya dengan harapan warganya akan mau untuk menaati peraturan yang di jalankan di Baitul Mal.

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

Di dalam kegiatan Baitul Mal telah terlihat partisipasi dari para anggota dan koordinator untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun sejumlah jaringan. Partisipasi yang dilakukan anggota ini muncul tidak dipaksakan dan tanpa paksaan dari siapapun. Prinsip yang mereka gunakan karena adanya saling kesamaan nasib kekusahan ekonomi dan atau bahkan pernah mengalami hal yang sama pernah terlilit hutang rentenir. Persahabatan yang terjalin antar tetangga dapat digambarkan oleh Bu hartati salah satu anggota Baitul Mal berprofesi pedagang bakso yang pernah terlilit hutang rentenir, walaupun sama-sama mengalami kesusahan dalam mencukupi ekonomi dan tidak bisa membantu secara langsung, beliau tetap membantu dengan memberikan saran kepada para tetangga yang mengalami kesusahan dengan mengajak meminjam saja kepada Baitul Mal, karena perasaan senasib dan kekeluargaan yang dekat membuat bu hartati memberikan saran untuk jangan mengambil uang di rentenir. Dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan dilamnya diikat oleh nilai-nilai yang tumbuh dan dipatuhi (fukuyama, 1995). Selain itu, walaupun bu hartati bukanlah seorang koordinator, beliau selalu mengingatkan tetangga yang menjadi anggota baitul mal untuk tidak lupa membayarkan uang angsuran kepada koordinator. Hal inilah yang membuat modal sosial di kelembagaan dapat berjalan kuat di lembaga ini.

Selain itu upaya untuk memperluas jaringan yang dirancangkan oleh Baznas berupa bagaimana antar baitul mal bersatu mengembangkan UKM yang ada dimasyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok dengan prinsip kesamaan usaha. Kelompok usaha tersebut dinamakan KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif). KMKP ini diarahkan yang dilakukan pendampingan dan dikelompokkan atas ikatan solidaritas sosial seperti kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan usaha. Usaha yang dirancangkan memiliki usaha yang sama dan mendukung konsep hulu hingga ke hilir mulai dengan rencana produksi hingga pemasaran.

1. Norma Sosial

Norma sosial akan akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk prilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sangsi-sangsi sosial[11]. Modal sosial yang ada di Baitul mal dengan mengembangkan norma dan nilai kejujuran, saling mempercayai antara Ketua dan koordinator dan anggota serta sebaliknya dan kejujuran, saling mempercayai antara KMKP produksi dan pemasaran serta sebaliknya akan terbangun kinerja baitul mal yang kokoh berlandaskan modal sosial yang kuat diantara mereka.

Persyaratan untuk melakukan pemanfaatan dana ZIS yang berupa pinjaman adalah dengan “menjadi anggota terlebih dahulu”, norma ini tergolong dalam norma informal atau tidak tertulis karena tidak ada syarat peminjaman untuk menjadi anggota dulu baru boleh meminjam, namun cara untuk menjadi anggota ada secara tertulis dan digolongkan dalam norma formal. Adapun cara menjadi anggota perlu memenuhi kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

1. menyerahkan foto kopi KTP
2. menyerahkan fotokopi KK
3. menabung di Baitul Mal secara sukarela
4. Anggota harus melampirkan foto usahanya.
5. membayar infak yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,00 per bulan

Dengan melengkapi segala hal di atas maka anggota secara otomatis menerima kartu angsuran yang otomatis menjadi kartu anggota sebagai bukti keanggotaan menjadi anggota Baitul Mal, maka setelah itu anggotaberhak untuk memperoleh pinjaman danadari Baitul Mal.

Dalam memperoleh pinjaman pada Baitul Mal terdapat jugaketentuan dalam setiap melakukan peminjaman antara lain:

1. Maka anggota dapat melakukan pengajuan pinjaman sebesar Rp500.000,00 – Rp. 5.000.000,00 per orang atau sesuai kebutuhan (hal ini tidak ada secara tertulis makamerupakan norma informal)
2. Pinjaman tidak dikenakan bunga (bunga 0%).
3. Dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan yaitu selama 4 bulan, (hal initidak ada secara tertulis maka termasuk dalam norma informal).
4. Bersedia untuk tidak kembali berhutang pada rentenir atau koperasi yang berkedok rentenir lagi

Sebenarnya aturan yang terdapat di atas tidak sepenuhnya ada secara tertulis, itulah yang disebut norma informal. Sedangkan norma yang secara tertulis merupakan norma formal. Adanya aturan/norma tersebut diharapkan segala proses keorganisasian dapat berjalan lancar.

Membahas tentang penyimpangan norma yang membuat terhambatnya pengembangan contohnya dapat dilihat pada setiap kegiatan peminjaman. Pada kegiatan peminjaman, terdapat sanksi apabila terlambat dalam pengembalian, apabila terlambat dalam pengembalian maka sanksi pertama adalah berupa “teguran”namun apabila teguran itu tidak dihiraukan maka tidakan berikutnya yaitu“nominal pinjaman dikurangi, ancaman tidak dipinjamkan lagi, tidak diberi pinjaman lagi”, disesuaikan dengan keadaan peminjam saat itu. Adanya rasa saling kebersamaan dan memiliki Baitul Mal membuat antar unsur baik Ketua, Koordinator dan anggota secara bersama-sama berupaya menjunjung norma-norma yang telah disepakati, hal ini dilakukan agar terciptanya iklim yang kondusif dan membuat kokoh keberadaan Baitul mal di tengah masyarakat Jodipan.

1. Nilai Sosial

Nilai bersifat abstrak, berada dalam bangunan fikiran ataupun akal budi, namun nilai dapat disimpulkan dan ditafsirkan pada ucapan, perbuatan dan materi yang dihasilkan[12]. Nilai-nilai yang teridentifikasi dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Baitul Mal antara lain Ketua Baitul Mal menjelaskan semenjak beliau aktif pada kegiatan Baitul Mal ada beberapa rentenir yang mereka sebenarnya warganya sendiri mulai tidak perhatian kepadanya. Mereka menjauh dan tidak mau berinteraksi dengannya. Beliau menyadari ini adalah konsekuensi jika berjuang menengakkan syariat agama. Nilai agama senantiasa berperan penting dan menjadi dasar beliau menjadi ketua baitul Mal di wilayahnya.

Keyakinan dan semangat pada diri beliau semakin bertambah besar untuk memberantas rentenir dan menanngulangi kemiskinan di wilayahnya ketika sebagian besar warganya yang merupakan anggotanya bersemangat mendukung setiap keputusan yang diambil Ketua saat memberantas rentenir. Diantara mereka secara tidak langsung telah terjalin hubungan solidaritas sosial.

Anggota Baitul Mal selalu memberi keyakinan kepada Ketua Baitul Mal untuk terus berjuang melawan rentenir. Hubungan yang muncul diantara Ketua Baitul Mal dan para anggotanya melebihi ikatan pertetanggan, namun telah menjadi ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan yang timbul ini memberikan kekuatan yang besar pada setiap elemen-elemen yang ada di Baitul mal untuk secara bersama-sama memajukan Baitul Mal. Nilai kesukarelaan dan kebersamaan menggambarkan hubungan antara Ketua, dan anggota.

1. Hubungan Timbal balik

Elemen modal sosial ini terlihat pada KMKP yang telah dibentuk yakni penjualan bakso. Pada KMKP ini dibagi menjadi tiga KMKP, yakni KMKP pedagang daging, KMKP Produksi, KMKP Pemasaran. Pada KMKP produksi dikelompokkan anggota Baitul Mal yang bergerak di sektor penjualan daging sapi. Para penjual daging sapi telah diberikan pelatihan dan telah dilakukan sumpah oleh MUI untuk menjual daging sapi yang berkualitas, sehat dan halal. KMKP pedagang daging ini selain menjual daging sapinya untuk konsumen umum, namun juga menyediakan stok daging bagi KMKP produksi. Anggota- Anggota KMKP produksi ini telah mendapat pelatihan dan keterampilan membuat bakso daging sapi yang berkualitas, sehat dan halal sesuai dengan fatwa MUI. Ketersediaan bakso yang berkualitas ini akan dipasarkan oleh KMKP pemasaran yang sengaja dikumpulkan dan dibentuk dari beberapa anggota yang bergerak di bidang sama yakni pedagang bakso yang berada di seluruh baitul Mal se Kota malang. Anggota KMKP pemasaran akan menerima bakso sehat dan sehat tersebut dan memasarkan kepada konsumen. KMKP pemasaran akan memasarkan bakso mereka dengan harga yang sama sesuai dengan kesepakatan dengan para anggota yang lain. Sehingga dengan adanya KMKP ini pedagang dapat menjual bakso yang halal dengan harga murah sehingga tersedianya bakso yang sehat dan halal dapat dengan mudah dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kelompok pemberdayaan membuat pemberdayaan ekonomi mayarakat miskin akan kuat dengan bermodalkan ikatan solidaritas sosial.

**Strategi Pemberdayaan dengan pendekatan Modal Sosial**

Pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor modal sosial, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal social. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

Pada pendekatan pertama, pendekatan pemungkinan digali sejauh mana menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki sasaran pemberdayaan sehingga tidak timbul perselisihan dan dapat bersama-sama mencapai kemajuan dan dapat berkembang secara optimal. Kegiatan pemungkinan akan berpusat pada diri individu pada diri anggota Baitul Mal yaitu dengan menghilangkan faktor penghalang yang selama ini berpengaruh pada partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan. Untuk itu, warga Jodipan yang menjadi anggota Baitul Mal harus berjanji lepas dari kebergantungan kepada rentenir dan bersedia untuk tidak kembali berhutang kepada mereka. Para anggota yang bersedia akan diberikan dana dan dibantu peneyelesaian masalah hutangnya kepada rentenir oleh Baitul Mal dan Baznas. Setelah mereka dilepaskan dari kebergantungan terhadap hutang rentenir ini diharapkan para anggota akan terbebaskan dari hutang yang selama ini mereka emban dan dapat bekerja. Perjanjian itu secara alami merupakan ikatan saling percaya diantara mereka.

Peranan modal sosial pada pendekatan ini sangatlah besar. Unsur kepercayaan seperti energi yang membuat kelompok, masyarakat dan baitul mal dapat bertahan menyelesaikan permasalahan warga untuk tidak berhutang lagi kepada rentenir, Ketua baitul mal memberikan kepercayaan kepada warganya dengan membantu melunasi hutang kepada rentenir dengan prinsip saling percaya dengan harapan warganya akan mau untuk menaati peraturan yang di jalankan di Baitul Mal. Beberapa kegiatan yang disusun berdasarkan pendekatan pemungkinan pada strategi pemberdayaan ini diantaranya dilakukan dengan mengumpulkan usaha-usaha mikro binaan baznas yang sejenis. Masing masing kelompok yang direkomendasikan memiliki usaha yang sama dan mendukung konsep hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga pemasaran. Pembentukan kelompok yang mempunyai usaha sejenis ini dimaksudkan tumbuhnya ikatan kebersamaan yang kuat dan sebagai sarana tumbuhnya solidaritas diantara mereka sehingga kemandirian kelompok dalam memecahkan permasalahan diantara mereka dapat terwujud.

Pemberdayaan di baitul Mal ini menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki sasaran pemberdayaan sehingga dapat berkembang secara optimal sekaligus tumbuhnya sistem jaringan mulai dari sistem produksi dan pemasaran sehingga kekuatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh kokoh dan pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian ekonomi pada masyarakat miskin. Pengelompokan berdasarkan rasa ikatan solidaritas ini bagaimana nilai-nilai ini dipertahankan, dan jika nilai ini bertahan maka pada akhirnya modal sosial ini akan lebih menjadi lebih kuat untuk mengetaskan kemiskinan dibandingkan modal uang itu sendiri.

Pendekatan pemberdayaan yang kedua adalah Penguatan. Pada penelitian ini akan digali sejauh mana kesadaran pelaku usaha mikro untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga potensi yang dimiliki dapat meminimalkan dan memecahkan permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pemberdayaan.

Pendekatan penguatan terlihat berupa keikutsertaan anggota pada berbagai kegiatan pengembangan potensi seperti pelatihan membuat sabun, pelatihan membuat bakery dan ice cream dan pelatihan membuat bakso merupakan upaya yang dilakukan mereka untuk mengembangkan potensi sehingga mampu memperbaiki keadaan ekonominya jauh lebih baik. Kegiatan ini bermaksud menumbuhkan memberikan keterampilan anggota dan warga yang sangat dibutuhkan dalam proses peningkatan wawasan dan keterampilan mereka. Pada pelatihan tersebut di berikan pelatihan bagaimana membuat kue dan ice cream yang enak dan halal, selain itu diberikan pengetahuan bagaimana mengemas hasil produksi sehingga dapat membuka peluang pasar mereka. Setelah pelatihan tersebut warga diberikan alat produksi sehingga dapat langsung mempraktekkan dan berjualan. Dalam pelaksanaannya para koordinator dan Ketua Baitul Mal akan selalu mengawasi dan mendampingi apabila dalam pelaksanaan produksi dan pemasaran mendapatkan kendala.

Pendekatan pemberdayaan yang ketiga adalah Perlindungan. Pada penelitian ini akan digali sejauh mana usaha yang dilakukan anggota atau pelaku usaha mikro untuk melindungi usaha-usahanya dari persaingan pengusaha yang lebih besar dan pelaku usaha mikro lainnya yang sering bermunculan bahkan dengan pelaku usaha yang sejenis.

Pendekatan ini terlihat pada setiap anggota telah tertanam nilai kejujuran untuk selalu mempertahankan kualitas dagangannya. Selain itu untuk melindungi dan mempertahankan usahanya dari persaingan bisnis yang semakin ketat, mereka senantiasa mempertahankan kualitas kepada konsumen dan aktif mengikuti kegiatan pameran baik guna mengenalkan dan memasarkan usaha dagangan mereka kepada konsumen selain yang ada dekat dengan lingkungan mereka. Dapat disimpulkan proses pemberdayaan pada unsur pendekatan perlindungan ini menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untukmemiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan,sehingga terhindar persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah.

Pendekatan pemberdayaan yang ke empat adalah Penyokongan. Dalam penelitian ini akan digali sejauhmana Penyokongan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu untuk menjalankan peranan dan tugasnya. Kegiatan penyokongan dilakukan dengan penguatan peran koordinator dan Ketua baitul mal sebagai pihak yang paling dekat dengan anggota atau mustahiq penerima manfaat dari dana ZIS. Penguatan ini dapat dilakukan baik dari, peningkatan kapasitas aparat dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang agar pihak-pihak tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Sumber kegiatan penyokongan yang ada di Baitul mal yakni penerimaan zakat yang dilakukan baznas terhadap zakat yang dikeluarkan pns se kota Malang. Pengoptimalisasi penerimaan zakat harus dilakukan dengan menumbuhkan kepercayaan calon muzzaki untuk mau mengelurakan zakatnya kepada baznas.

Penyokongan juga dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar serta dari seluruh Baitul Mal yang ada di Kota Malang.Dengan adanya kekuatan jaringan dari seluruh Baitul Mal yang ada maka sinergitas kegiatan pemberdayaan dan dukungan konsep pemberdayaan dari hulu ke hilir dapat dilakukan dengan baik. Dari uraian informan diatas tampak bahwa selama ini keberadaan mereka sangat terbantu dengan adanya sistim jaringan tersebut.Untuk lingkungan sekitar agar kondisi masyarakat kondusif terhadap pelaksanaan pemberdayaan, maka mereka perlu mendapatkan pemahaman tentang pemberdayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan pemberdayaan sehingga masyarakat paham dan mendukung proses pemberdayaan.

Pendekatan pemberdayaan yang terakhir adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan agar pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha. Kegiatan yang dilakukan dalam pendekatan pemeliharaan berupa melaksanakan kegiatan rapat evaluasi rutin yang guna menjalin koordinasi terkait permasalahan serta kegiatan-kegiatan yang ada di Baitul mal di Kota Malang. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pengurus baitul mal, pengurus dan dewan pengawas Baznas Kota Malang. Partisipasi untuk membangun jaringan ini menjadi kekuatan dalam kegiatan pemeberdayan pada tahap ini.

**KESIMPULAN**

Peranan yang telah dilaksanakan Baitul Mal yakni menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah berupa menerapkan sistem ekonomi islami yakni memberikan modal tanpa bunga, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, dan melepaskan ketergantungan pada rentenir. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakt Jodipan menjadi dasar bagi terlaksananya kegiatan penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Al-Hidayah yang dilakukan dengan proses pemberdayaan yang berlangsung diantara mereka. Norma kekeluargaan, kebersamaan, dan kepercayaan menjadi pendorong bagi para mustahiq (anggota) untuk membuat saudara sekampungnya untuk bergabung menjadi anggota di Baitul Mal agar terlepas dari jeratan rentenir sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, norma-norma ini dapat memperluas jejaring yang telah mereka miliki, sehingga jaringan yang mereka miliki tidak hanya terbatas pada kelompok usaha yang ada dikampungnya saja, tetapi juga dengan pihak-pihak yang mendukung pengembangan usaha yang mereka miliki seperti Baznas dan kelompok jaringan dengan usaha yang sejenis di Baitul Mal yang lain di Kota Malang.

Strategi Pemberdayaan pada pedagang usaha mikro binaan Baitul Mal dimulai dari meniadakan faktor penghalang yang selama ini berpengaruh pada partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan yakni kebergantungan terhadap rentenir.Kemudian dilakukan pemberdaan secara kelompok dengan mengumpulkan usaha mereka sesuai dengan konsep hulu ke hilir dengan prinsip solidaritas diantara mereka. kemudian dilakukan kegiatan pelatihan, memberikan sertifikasi menejemen mutu halal dari MUI dan mengikutsertakan usaha binaan Baitul Mal dalam pameran hasil UMKM serta melakukan rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh dewan pengawas syariah guna menjamin kepastian dan keberlangsungan usaha mereka sehingga secara berkala dan dalam waktu panjang akan memandirikan mereka sehingga akan timbul muzzaki baru.

**SARAN**

Saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Peranan Baitul Mal pada umumnya keberadaan Baitul Mal Al-Hidayah hanya fokus pada penyaluran zakat produktif saja. Padahal lembaga baitul mal juga berfungsi sebagai pengumpul dana ZIS. Dana ZIS ini hanya terkumpul dari infak yang dipotong dari tunjangan penghasilan PNS se kota malang. Kurang populer lembaga Baitul mal dan kurangnya sarana publikasi kepada masyarakat menjadi kurang optimalnya fungsi baitul mal ini. Agaknya ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mempublikasikan Baitul Mal. Jika Baitul mal belum belum dikenal dan belum mendapat kepercayaan dari masyarakat luar PNS, harus dicari penyebabnya karena berdasarkan pengamatan ternyata masih banyak kaum muslimin yang belum mengenal lembaga tersebut. Selain itu belum ditemukannnya kegiatan yang bersifat meningkatkan pemahaman anggota terhadap nilai-nilai ajaran agama islam. Pengajian rutin hanya yang diselenggarakan oleh warga, oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman nilai-nilai agama islam berupa pengajian yang dilaksanakan oleh baitul Mal dan antar Baitul Mal se Kota Malang guna mempererat hubungan solidaritas dan nilai keislaman diantara mereka.

2. Perlu dilakukan kegiatan oleh pihak eksternal yang indipenden guna melakukan monitoring atau semacam audit terhadap Baitul Mal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan ketidaktepatan sasaran pemberdayaan sehingga tercapai strategi pemberdayaan guna menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap mustahiq untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima manfaat dana ZIS.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini guna mengkaji secara mendalam terkait temuan-temuan penelitian terutama mengenai dimensi modal sosial apa yang paling berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh aktivitas-aktivitas apa yang mengkonstruksi dimensi tersebut.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan program magister sosiologi kajian kemiskinan di Universtas Brawijaya. Terima kasih juga kepada segenap karyawan BAZNAS Kota Malang, Ketua dan segenap anggota Baitul Mal Al-Hdayah, petugas kelurahan Jodipan, dan atas kesediannya menjadi tempat penelitian bagi penulis dalam menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir dari program magister sosiologi kajian kemiskinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Bapeko. 2015. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah tahun 2015. Malang: Bappeda
2. BAZNAS Kota Malang. 2014. *Annual Report 2014*.Malang.
3. Field. John. 2014. Modal Sosial. Bantul. Kreasi Wacana.
4. Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity, NY: Free Press
5. Hasbullah J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia).*Jakarta:MR-United Press.
6. Leksono. 2009. Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional, Perspektif Emic Kualitatif. Malang: Citra Malang.
7. Miles, M. B.,Huberman A. M. & Saldhana, Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook Third Edition. United Kingdom. Sage Publications Inc.Soenyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Kediri: Jenggala Pustaka Utama.
8. Putnam, Robert, D. (1995). Tuningin, Tuning Out: The strange disappearences of Social Capital in America. Political Science and Politics.
9. Sahri, Muhammad. 2006. Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin. Malang: Bahtera Press
10. Soenyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jenggala Pustaka Utama. Kediri.
11. Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.. Bandung: Alfabeta.
12. Zenrif, Fauzan. 2015. NU di Tengah Globalisasi. Kritik, Solusi dan Aksi. Malang. UIN Maliki Press